Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 468 - 482
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5388
■ *Received* 05/05/2025 ■ *Revised* 10/06/2025 ■ *Accepted* 16/06/2025

Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa

Fitra Syahdanul[1)], Muhammad[2)],
[1)2)] Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
E-mail correstpondence: fitrasyahdanul0@gmail.com

Keywords :
Political education, Empowerment, Political efficacy, General Elections Commission, Political ecology of culture.

Kata Kunci :
Pendidikan politik, ,Pemberdayaan, efikasi politik, Komisi Pemilihan Umum, Ekologi politik budaya

Abstract
This study analyzes the political education strategy of the General Elections Commission (KPU) of Kabupaten Gowa Regency in empowering first-time voters and its impact on the democratic participation of youth within a multicultural and semi-agrarian local context. Using a qualitative single case study approach, the research integrates four main theoretical frameworks Empowerment Theory, Political Self-Efficacy, Critical Institutionalism, and the Political Ecology of Culture to examine institutional dynamics, youth responses, and socio-cultural barriers that influence program effectiveness. The findings indicate that although there is an increase in procedural knowledge and internal efficacy among young voters, the transformation of political agency remains symbolic and is hindered by patronage structures, the kinship values of panngaderreng, and digital inequality. The political education initiated by the General Elections Commission tends to be procedural, lacks reflective depth, and has not yet fully adapted to the local context. This study recommends a transition toward a participatory co-design model, integration of local cultural values, and a reformulation of evaluation indicators based on political transformation. The theoretical implications include a refinement of the understanding of political efficacy in local democratic systems, while practically, this study offers a more contextual, inclusive, and sustainable framework for political education design.

Abstrak
Penelitian ini menganalisis strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa dalam memberdayakan pemilih pemula serta dampaknya terhadap partisipasi demokratis pemuda dalam konteks lokal yang multikultural dan semi-agraris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal , penelitian ini mengintegrasikan empat kerangka teoritik utama Teori Pemberdayaan, Efikasi Diri Politik, Institusionalisme Kritis, dan Ekologi Politik Budaya untuk menelaah dinamika kelembagaan, respons pemuda, dan hambatan sosial-budaya yang memengaruhi efektivitas program. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengetahuan prosedural dan efikasi internal di kalangan pemilih muda, transformasi agensi politik masih bersifat simbolik dan terhambat oleh struktur *patronase*, nilai kekerabatan *panngaderreng*, serta ketimpangan digital. Pendidikan politik yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum cenderung prosedural, kurang reflektif, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini merekomendasikan transisi menuju model *participatory co-design*, integrasi nilai budaya lokal, dan reformulasi indikator evaluasi berbasis transformasi politik. Implikasi teoritisnya meliputi penajaman pemahaman tentang efikasi politik dalam sistem demokrasi lokal, sementara secara praktis, studi ini menawarkan kerangka desain pendidikan politik yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kabupaten Gowa merupakan strategi krusial untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam menjaga ketahanan demokrasi, terutama di tengah maraknya disinformasi, rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik, dan kuatnya politik patronase (Wahyuningroem et al., 2024; Yaakub et al., 2023). Berdasarkan *Empowerment Theory* (Zimmerman & Rappaport, 1988),pendidikan politik tidak sekadar menyampaikan prosedur pemilu, melainkan juga memperkuat kapasitas kognitif, afektif, dan perilaku pemuda agar mampu berpartisipasi secara kritis. Konsep *Political Self-Efficacy* (Bandura, 1977) menjelaskan bahwa partisipasi pemuda bergantung pada efikasi internal (keyakinan akan kemampuan diri memahami politik) dan efikasi eksternal (kepercayaan bahwa sistem politik responsif terhadap partisipasi). Namun, tantangan seperti keterbatasan akses informasi akurat, polarisasi identitas, dan kesenjangan sosio-ekonomi menghambat efektivitas pendidikan politik (Amedu, 2023) Di Kabupaten Gowa, program pendidikan politik sering kali tidak selaras dengan kebutuhan lokal, seperti rendahnya akses internet di pedesaan dan norma kekerabatan tradisional (panngaderreng), yang memperparah rendahnya partisipasi pemuda (Murtiningsih et al., 2024)

Pemilih pemula, yang mencakup 38% dari 750.000 penduduk Kabupaten Gowa, menjadi fokus utama upaya pendidikan politik (BPS Gowa, 2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa berperan sebagai aktor institusional utama, bekerja sama dengan sekolah, organisasi pemuda, dan tokoh adat untuk meningkatkan literasi politik. Pendekatan *Critical Institutionalism* menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan politik bergantung pada interaksi antara KPU dan agen lokal, seperti komunitas adat dan masyarakat sipil (Kosandi, 2015). Namun, relasi patron-klien yang kuat di Kabupaten Gowa sering kali membatasi keterlibatan pemuda, karena loyalitas sosial cenderung mengikat mereka pada pola politik tradisional (Boulianne & Brailey, 2014). Oleh karena itu, kolaborasi dengan organisasi pemuda dan tokoh masyarakat diperlukan untuk menciptakan program yang inklusif dan relevan dengan dinamika lokal (Fikri et al., 2023).

Kabupaten Kabupaten Gowa, sebagai wilayah multikultural dan semi-agrarian, menghadapi tantangan unik akibat dinamika sosio-kultural dalam sistem desentralisasi (Sanusi, 2024). Pendekatan *Political Culture Ecology* menekankan bahwa norma lokal, seperti *panngaderreng* (sistem kekerabatan Bugis-Makassar), membentuk cara pemuda merespons pendidikan politik. Kesenjangan antara wilayah desa dan kota, ditambah dengan akses internet yang terbatas di pedesaan, memperburuk rendahnya partisipasi pemilih pemula, yang hanya mencapai 62% pada Pemilu 2024 (BPS Gowa, 2024). Literatur yang berfokus pada wilayah urban seperti Jakarta sering

mengabaikan kompleksitas sosio-politik daerah seperti Kabupaten Gowa, sehingga diperlukan kajian yang lebih kontekstual (Saud & Margono, 2021).

Tantangan pendidikan politik di Kabupaten Gowa menjadi sorotan utama pada Pemilu 2024, ketika KPU Kabupaten Gowa meluncurkan kampanye literasi digital, seperti webinar dan kuis online, serta workshop di sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik pemuda. Namun, program ini kurang efektif karena minimnya adaptasi terhadap kondisi sosio-demografis lokal, seperti keterbatasan teknologi di pedesaan (Novianti, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman langsung, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilu, dan pelibatan dalam kegiatan kewarganegaraan, terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran politik sejak dini (Bulqiyah et al., 2023; Eisman et al., 2016). Oleh karena itu, transformasi strategi pendidikan politik dari sosialisasi prosedural menjadi alat pemberdayaan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak.

Pendidikan politik penting untuk mengatasi apatisme politik pemuda, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap isu ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, dan polarisasi identitas (Amedu, 2023; Thamrin et al., 2024). Di Kabupaten Gowa, politik patronase memperburuk situasi, karena keterikatan sosial sering kali membatasi kebebasan pemuda dalam membuat keputusan politik independen (Akinyetun, 2021). Selain itu, rendahnya akses informasi akurat, terutama di pedesaan, memperlemah literasi politik. Pendidikan politik yang responsif terhadap tantangan ini diperlukan untuk membangun komunitas yang inklusif dan memperkuat kualitas demokrasi lokal. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip demokrasi modern juga penting untuk menjembatani kesenjangan budaya (Harsyaf & Khaerah, 2023; Kamil & Indah, 2022).

Pendidikan politik di Kabupaten Gowa harus dirancang secara terintegrasi dan kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan teknologi pemuda (Basabah, 2024). Pendekatan berbasis pengalaman langsung, seperti pendidikan kewarganegaraan partisipatif, diskusi kelompok, dan simulasi pemilu, dapat meningkatkan efikasi politik dan kesadaran kritis pemuda (Ohme, 2019). KPU Kabupaten Gowa perlu melibatkan tokoh adat dan organisasi pemuda dalam merumuskan pesan demokrasi yang selaras dengan norma lokal, seperti *panngaderreng*, untuk memastikan relevansi program (Sanusi, 2024). Selain itu, evaluasi strategi digital, seperti webinar dan kuis online, harus mempertimbangkan keterbatasan akses internet di pedesaan, dengan memprioritaskan metode offline seperti kampanye langsung atau media komunitas lokal (Murtiningsih et al., 2024). Pendekatan kuantitatif, seperti survei partisipasi, perlu dilengkapi dengan eksplorasi kualitatif untuk memahami persepsi dan pengalaman pemuda terhadap program pendidikan politik (Marsuki et al., 2022).

Pendidikan politik di Kabupaten Gowa harus dipahami sebagai proses negosiasi antara nilai tradisional dan prinsip demokrasi, bukan sekadar transfer pengetahuan (Kamil & Indah, 2022). Keterlibatan aktif pemuda dalam pengambilan keputusan, transparansi institusi, dan peningkatan kesadaran politik sehari-hari melalui media sosial juga penting untuk membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi (Palomares et al., 2021). Media sosial, meskipun berpotensi meningkatkan literasi politik, harus didukung oleh kemampuan kritis pemuda dalam memilah informasi untuk menghadapi disinformasi (Amedu, 2023).

Untuk mencapai tujuan ini, KPU Kabupaten Gowa dapat mengadopsi model kolaborasi antar-pemangku kepentingan, termasuk sekolah, organisasi pemuda, dan masyarakat sipil, sebagaimana direkomendasikan oleh studi sebelumnya (Fikri et al., 2023). Program seperti pelatihan kepemimpinan politik bagi pemuda lokal atau festival demokrasi yang mengintegrasikan seni dan budaya Bugis-Makassar dapat memperkuat keterlibatan pemuda. Dengan menggabungkan teori *Empowerment Theory*, *Political Self-Efficacy*, *Critical Institutionalism*, dan *Political Culture Ecology*, pendidikan politik di Kabupaten Gowa dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif, mampu mentransformasi pemuda menjadi agen perubahan yang kritis dan inklusif dalam demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Hollweck, 2015) mengemukakan pentingnya metodologi studi kasus dalam penelitian, terutama ketika objek analisis bersifat unik, kritis, atau representatif untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks nyata. Dalam konteks ini, studi kasus tunggal menjadi sangat relevan karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang situasi tertentu yang tidak dapat dicapai melalui metode penelitian lain (Utomo & Sari, 2023) berfokus pada eksplorasi mendalam strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam memberdayakan pemilih pemula. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman kontekstual atas kompleksitas dinamika lokal, termasuk peran struktur sosial, norma budaya, dan hubungan antara institusi dan komunitas. Studi kasus tunggal digunakan untuk menggambarkan KPU Kabupaten Gowa sebagai entitas unik di wilayah semi-agraris dan multikultural, sekaligus sebagai aktor penting dalam praktik demokrasi lokal.

Data dianalisis secara tematik melalui proses transkripsi, reduksi, dan kategorisasi berdasarkan pola yang muncul seperti persepsi efektivitas, hambatan struktural, dan adaptasi nilai lokal. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori. Analisis dibingkai oleh empat pendekatan teoritik: Teori Pemberdayaan, Efikasi Diri Politik, Institusionalisme Kritis, dan Ekologi Politik Budaya untuk menangkap pemaknaan pendidikan politik sebagai sarana penguatan

agensi dan kesadaran kritis dalam konteks politik patronase. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dalam penelitian ini dapat didasarkan pada *Affective Methodology* (Knudsen & Stage, 2015) yang menekankan peran emosi sebagai elemen sentral dalam memahami pengalaman manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi afektif, seperti antusiasme, kecemasan, atau ketidakpercayaan) yang muncul saat informan yakni Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, Pemilih pemula di SMA Negeri 9 Kabupaten Gowa, Tokoh masyarakat di Kabupaten Gowa, dan Aktivis pemuda di Kabupaten Gowa menceritakan persepsi dan pengalaman mereka terkait literasi politik. Dengan menerapkan teori ini, wawancara dirancang untuk menangkap tidak hanya isi naratif, tetapi juga intensitas emosional dan konteks afektif yang membentuk sikap informan terhadap proses pemilu, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang dinamika emosi yang memengaruhi partisipasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Internal Program Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa

Dinamika internal program pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa menunjukkan ketegangan konseptual yang dapat dibaca melalui lensa institusionalisme kritis. Struktur birokrasi yang kaku, logika administratif, dan tekanan politik lokal membentuk pendekatan pendidikan politik yang cenderung prosedural dan teknokratik. Temuan lapangan mengindikasikan adanya jarak antara komitmen normatif untuk pemberdayaan pemilih pemula dan praktik implementasi yang lebih fokus pada sosialisasi teknis dan pencapaian indikator kuantitatif. Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menegaskan bahwa dimensi kritis dan partisipatif pendidikan politik masih terabaikan. Temuan ini tidak hanya mengungkap keterbatasan pendekatan top-down KPU, tetapi juga memperkaya diskusi akademik tentang perlunya rekonstruksi paradigma pendidikan politik yang lebih kontekstual dan partisipatif, terutama di wilayah dengan kompleksitas sosio-kultural tinggi.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Muda di Kabupaten Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2024

Kategori	Jumlah/Estimasi	Keterangan
Total Daftar Pemilih Tetap (DPT)	561.624 orang	Seluruh pemilih terdaftar di Kabupaten Kabupaten Gowa

Total Pemilih Menggunakan Hak Pilih	474.174 orang (84,43%)	Jumlah yang hadir dan menggunakan hak pilih
Estimasi Pemilih Usia 17–30 Tahun (Pemilih Muda)	± 280.000 orang (±50% DPT)	Mengacu pada pernyataan KPU Kabupaten Gowa dan tren nasional bahwa ±50% pemilih merupakan kalangan muda
Estimasi Partisipasi Pemilih Muda	± 237.000 orang (estimasi 84,43% dari 280.000)	Diasumsikan tingkat partisipasi pemilih muda setara dengan rerata kabupaten (84,43%)
Capaian KPU Kabupaten Gowa	Penerima Penghargaan Nasional KPU	Atas indeks partisipasi pemilih tertinggi, termasuk kontribusi dari pemilih muda

Sumber : Hasil Analisis Sekunder Peneliti 2024

Wawancara dengan berbagai pihak terkait program pendidikan politik pemula oleh KPU Kabupaten Gowa menunjukkan adanya tantangan besar dalam menyelaraskan idealisme pendidikan politik dengan keterbatasan birokrasi dan konteks lokal. Divisi Sosialisasi KPU Gowa menghadapi kendala pedoman teknis yang kaku dari pusat, membatasi inovasi dalam pengembangan modul interaktif, serta praktik self-censorship untuk menghindari isu sensitif seperti politik uang dan dinasti politik demi menjaga stabilitas politik lokal. Sementara itu, pemilih pemula, khususnya di SMA Negeri 9 Gowa, merasa materi yang disampaikan kurang substantif, berulang dengan kurikulum PPKn, dan tidak menjawab kebutuhan mereka untuk memahami cara memilih calon yang relevan dengan aspirasi anak muda. Kegiatan sosialisasi juga dinilai kurang menjangkau wilayah pedesaan, tempat banyak pemilih pemula berada, dengan materi yang sulit dipahami. Selain itu, pendekatan yang tidak kontekstual dengan nilai budaya lokal, seperti konsep "siri" dalam budaya Bugis-Makassar, membuat program kurang resonan dengan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran politik, efektivitas program pendidikan politik pemula di Gowa masih terhambat oleh birokrasi, pendekatan yang kurang inklusif, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan serta nilai lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kabupaten Gowa masih didominasi pendekatan prosedural dan teknokratik, meskipun ada komitmen kelembagaan untuk meningkatkan literasi

politik melalui berbagai inisiatif. Pendekatan top-down ini mengabaikan aspek partisipatif dan reflektif dalam pembelajaran politik. Dari perspektif Institusionalisme Kritis, hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh struktur birokratik dan tekanan politik lokal yang membatasi inovasi pedagogis (Kosandi, 2015). Fokus pada indikator kuantitatif dan minimnya pelibatan komunitas lokal memperlemah efektivitas program, terutama dalam konteks sosial multikultural dan relasi patronase yang kompleks. Tanpa perubahan paradigma menuju pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif, pendidikan politik berisiko tetap bersifat formalistik dan tidak membangkitkan agensi pemilih muda secara substantif.

B. Respons Pemilih Pemula terhadap Pendidikan Politik

Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam keberlanjutan demokrasi karena mereka akan menentukan arah kebijakan di masa depan. Pendidikan politik menjadi instrumen kunci dalam membentuk pemahaman dan partisipasi mereka. Namun, respons terhadap pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, media, pendidikan, dan kualitas penyampaian. Studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman (*experiential learning*) lebih efektif mendorong partisipasi dibandingkan metode teoritis semata. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemilih pemula menginternalisasi pendidikan politik dalam konteks sosial-politik lokal yang khas (Hannuksela, 2024).

Tabel 2. Anggaran Pendidikan Politik Pemula KPU Kabupaten Gowa 2024

Tahun	Jenis Kegiatan Pendidikan Politik Pemula	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Keterangan
2024	Sosialisasi Road to School (kunjungan ke sekolah)	50.000.000	APBD Kab. Gowa	Kunjungan ke sekolah untuk edukasi pemilih pemula.
2024	Penyebaran Informasi melalui Alat Peraga (spanduk, brosur)	30.000.000	APBD Kab. Gowa	Pembuatan dan distribusi spanduk serta brosur edukasi.
2024	Sosialisasi melalui Media Massa (radio, koran)	40.000.000	APBD Kab. Gowa	Iklan dan publikasi di media lokal untuk pemilih pemula.
2024	Program Relawan Demokrasi (pelatihan relawan)	60.000.000	APBD Kab. Gowa	Pelatihan relawan untuk edukasi pemilih pemula di komunitas.
2024	Sosialisasi Mobil Keliling	25.000.000	APBD Kab. Gowa	Mobil keliling untuk sosialisasi di wilayah terpencil.

2024	Workshop Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula	50.000.000	APBD Kab. Gowa	Workshop di tingkat kecamatan/sekolah untuk pemilih pemula.
2024	Lomba Penulisan Esai dan Debat Pelajar	35.000.000	APBD Kab. Gowa	Kompetisi untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.
Total 2024		290.000.000		Total anggaran pendidikan politik pemula tahun 2024.

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 2024

Anggaran pendidikan politik pemula KPU Kabupaten Gowa tahun 2024 menunjukkan bahwa total anggaran sebesar Rp290.000.000 dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, dengan pendanaan sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Gowa. Program yang paling banyak mendapat alokasi anggaran adalah Program Relawan Demokrasi (Rp60.000.000), diikuti oleh Sosialisasi Road to School dan Workshop Pendidikan Politik (masing-masing Rp50.000.000), yang mencerminkan fokus pada pelatihan relawan dan edukasi langsung di sekolah. Namun, anggaran untuk kegiatan seperti Sosialisasi Mobil Keliling (Rp25.000.000) dan Penyebaran Informasi melalui Alat Peraga (Rp30.000.000) relatif lebih kecil, yang mungkin membatasi jangkauan ke wilayah terpencil dan efektivitas penyampaian informasi. Meskipun beragam kegiatan seperti lomba esai dan debat pelajar (Rp35.000.000) menunjukkan upaya kreatif untuk melibatkan pemilih pemula, alokasi anggaran ini hanya sekitar 1-2% dari total anggaran Pilkada Kabupaten Gowa 2024 (Rp30 miliar), mengindikasikan bahwa pendidikan politik pemula bukan prioritas utama dalam anggaran keseluruhan. Data ini juga menyoroti perlunya evaluasi untuk memastikan distribusi anggaran yang lebih merata dan efektif, terutama untuk menjangkau pemilih pemula di wilayah pedesaan.

Wawancara dengan pemilih pemula di SMA Negeri 9 Kabupaten Gowa dan aktivis pemuda di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik KPU, seperti workshop, pelatihan digital, dan kampanye media sosial, berhasil menyampaikan informasi dasar tentang proses pemilu, seperti cara mencoblos dan pelanggaran yang dapat dilaporkan, yang diterima positif karena bentuknya yang visual dan interaktif. Namun, terdapat keterbatasan signifikan dalam menumbuhkan pemahaman mendalam tentang ideologi partai politik atau pentingnya kebijakan publik, dengan banyak pemilih pemula yang merasa politik masih terasa jauh dari kehidupan mereka dan hanya menjadi "urusan orang atas". Selain itu, meskipun ada apresiasi terhadap upaya KPU, pemilih pemula dan aktivis pemuda menyimpan skeptisisme terhadap integritas sistem politik, merasa suara mereka kurang berpengaruh dan hasil pemilu cenderung dapat diprediksi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik KPU Kabupaten Gowa perlu lebih menekankan pada

pendekatan yang relevan dengan aspirasi anak muda, membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi, dan mengatasi persepsi bahwa politik hanya untuk kalangan elit.

Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan efikasi internal di mana pemilih pemula merasa lebih paham dan percaya diri terhadap proses electoral namun tidak diiringi oleh efikasi eksternal yang memadai. Minimnya infrastruktur digital dan interaksi langsung menjadi hambatan utama dalam distribusi informasi politik yang merata, memperlihatkan bagaimana *ecology of access* turut memengaruhi kualitas respons dan partisipasi pemilih pemula.

Respons pemilih pemula terhadap strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa menunjukkan dinamika ambivalen. Program seperti workshop dan kampanye media sosial meningkatkan pengetahuan prosedural, tetapi belum mendorong keterlibatan yang lebih reflektif terhadap isu politik substantif. Politik masih dipandang negatif dan jauh dari realitas mereka. Berdasarkan Teori Efikasi Diri Politik (Bandura, 1977), efikasi internal meningkat secara moderat—terlihat dari kepercayaan diri mereka dalam memahami proses pemilu. Namun, efikasi eksternal tetap rendah; banyak yang pesimistis terhadap respons sistem politik dan terjebak dalam skeptisisme terhadap patronase dan vote buying. Hal ini mencerminkan paradoks bahwa peningkatan pemahaman tidak otomatis mendorong partisipasi bermakna tanpa dukungan perubahan struktural dan institusional.

C. Transformasi Agensi Pemuda

Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, pemuda kerap diposisikan sebagai agen perubahan sosial yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembaruan politik. Namun, agensi pemuda bukan entitas yang statis, melainkan terbentuk dan mengalami transformasi seiring interaksinya dengan struktur sosial, institusi politik, dan medan kekuasaan yang mengitarinya. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang produksi agensi, tempat pemuda merumuskan ulang posisi, peran, dan kapasitasnya dalam kehidupan publik.

Gambar 1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa 2024

Adanya indikasi awal transformasi agensi politik di kalangan peserta, terutama pada tingkat kognitif. Pelatihan kepemudaan, diskusi politik, dan simulasi pemilu telah meningkatkan kesadaran pemuda terhadap praktik tidak sehat seperti politik uang dan dominasi elit lokal, mendorong mereka untuk mempertanyakan norma yang sebelumnya dianggap wajar dan memahami hak mereka untuk memilih berdasarkan gagasan. Kegiatan seperti simulasi pemilu juga berhasil memicu minat untuk terlibat dalam diskusi publik, meskipun sebagian peserta, seperti siswi SMA Negeri 9, masih merasa kurang percaya diri untuk bersuara secara terbuka. Namun, transformasi ini belum berkembang menjadi tindakan kolektif atau keberanian politik yang berkelanjutan karena hambatan seperti ketakutan akan stigma sosial, tekanan dari aktor lokal yang berkuasa, dan minimnya ruang aman untuk berekspresi. Dalam kerangka Teori Pemberdayaan Zimmerman, dimensi pemahaman dan artikulasi politik mulai terbentuk, tetapi kontrol terhadap keputusan dan keterlibatan kritis terhadap struktur sosial masih terbatas. Pendekatan top-down dalam program KPU, yang kurang melibatkan pemuda dalam merancang proses, serta ketiadaan dukungan kelembagaan yang memadai, menjadi faktor utama yang menghambat evolusi agensi politik ke tingkat yang lebih struktural. Untuk memperkuat dampaknya, program pendidikan politik perlu lebih partisipatif, kontekstual, dan menyediakan ruang aman bagi pemuda untuk mengembangkan keberanian dan keterlibatan politik yang berkelanjutan.

Kurangnya rasa kepemilikan atas proses politik menyebabkan rendahnya inisiatif pemuda untuk terlibat dalam aksi atau advokasi lanjutan. Transformasi agensi politik tidak cukup didorong oleh informasi semata, tetapi memerlukan ruang partisipasi yang reflektif dan didukung secara struktural. Temuan ini

mengindikasikan bahwa meskipun terdapat gejala awal munculnya agensi—terutama pada peserta program interaktif seperti simulasi pemilu dan diskusi komunitas—tingkat pemberdayaan politik yang dicapai masih terbatas. Dalam kerangka Teori Pemberdayaan (Zimmerman & Rappaport, 1988) , peningkatan terjadi pada aspek kompetensi, tetapi dimensi kontrol dan keterlibatan kritis masih lemah. Banyak pemuda sadar akan isu seperti vote buying dan dominasi elite lokal, tetapi tetap pasif karena minim dukungan sosial serta khawatir terhadap stigma atau tekanan dari jejaring patronase. Hal ini menunjukkan bahwa agensi politik yang tumbuh berisiko menjadi simbolik jika tidak ditopang oleh ekosistem politik yang inklusif dan suportif.

D. Hambatan Kontekstual

Meskipun berbagai program pendidikan politik telah dirancang untuk memperluas kapasitas partisipatif generasi muda, keberhasilannya sering kali dibatasi oleh faktor-faktor kontekstual yang kompleks dan saling berkelindan. Dalam studi partisipasi politik, konteks sosial, ekonomi, budaya, dan institusional memainkan peran krusial dalam membentuk dan sering kali menghambat agensi politik individu, khususnya di kalangan pemilih pemula. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, seperti keterbatasan akses informasi atau infrastruktur digital, tetapi juga bersifat struktural dan kultural, seperti dominasi patronase politik, konservatisme nilai lokal, serta minimnya ruang deliberatif yang aman dan inklusif.

Dalam wawancara dengan pemilih pemula siswi SMA Negeri 9, muncul narasi yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh struktur sosial tradisional terhadap preferensi dan perilaku politik mereka. Seorang informan muda mengungkapkan bahwa meskipun ia mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, pilihan politiknya tetap didasarkan pada arahan tokoh keluarga yang lebih tua.

> "Kami diajarkan untuk menghormati apa yang disarankan tetua, karena mereka dianggap lebih tahu dan sudah berpengalaman," ujarnya (Wawancara pada tanggal 05 November 2024).

Ungkapan ini merefleksikan internalisasi nilai-nilai *panngaderreng* yang menekankan loyalitas dan hierarki sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam ranah politik. Informan lainnya, menyatakan bahwa :

> "meskipun memahami pentingnya memilih berdasarkan program kerja calon, tekanan sosial dari lingkungan membuatnya merasa "tidak enak hati" untuk menyimpang dari pilihan keluarga besarnya. (Wawancara pada tanggal 05 November 2024).

Wawancara-wawancara ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik formal, ketika berhadapan dengan sistem nilai yang telah mengakar dalam keseharian masyarakat, sering kali mengalami pembelokan makna. Pesan-pesan demokrasi

partisipatoris yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum tidak ditolak secara terang-terangan, tetapi direinterpretasi agar sesuai dengan praktik sosial yang telah mapan. Seorang tokoh pemuda dari komunitas adat bahkan menyatakan bahwa pesan-pesan tersebut "bagus tapi terlalu ideal" dan "tidak cocok kalau langsung diterapkan di kampung". Ketika ditanya lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa politik dalam komunitasnya bukan soal ide atau program, tetapi tentang menjaga keharmonisan sosial dan menghormati otoritas adat.

Selain tantangan budaya, hambatan juga muncul dari keterbatasan akses teknologi dan disparitas literasi digital. Informan yang seorang aktivis pemuda di Kabupaten Kabupaten Gowa melaporkan bahwa mereka jarang mengikuti kampanye digital karena koneksi internet yang buruk dan kurangnya perangkat memadai.

> "Kami lebih sering tahu informasi dari obrolan di warung atau masjid daripada dari media sosial," (Wawancara pada tanggal 06 November 2024).

Nilai-nilai budaya lokal, seperti panngaderreng yang menekankan loyalitas terhadap tetua dan hierarki sosial, secara signifikan memengaruhi preferensi politik pemuda, menyebabkan pilihan mereka lebih didasarkan pada arahan keluarga atau komunitas daripada gagasan atau program calon. Tekanan sosial untuk menjaga harmoni dan menghormati otoritas adat membuat pesan demokrasi partisipatoris dari KPU direinterpretasi agar sesuai dengan norma lokal, sehingga mengurangi dampaknya. Selain itu, keterbatasan akses teknologi, seperti koneksi internet yang buruk dan minimnya perangkat di wilayah pedesaan, menghambat efektivitas program digital KPU, dengan pemuda lebih mengandalkan informasi dari interaksi langsung seperti obrolan di warung atau masjid. Dalam kerangka Ekologi Politik Budaya, ketegangan antara legitimasi modern (pilihan rasional) dan tradisional (loyalitas sosial) menunjukkan bahwa pendekatan top-down KPU kurang relevan secara simbolik dan tidak cukup dialogis. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, KPU perlu merancang strategi yang sensitif terhadap budaya lokal, fleksibel dalam format penyampaian, dan memperhatikan ketimpangan akses teknologi serta relasi kuasa, sehingga dapat membangun partisipasi yang inklusif dan bermakna melalui proses yang lebih intersubjektif dan melibatkan komunitas secara aktif.

Program daring Komisi Pemilihan Umum seperti webinar dan konten digital belum efektif menjangkau pemuda di wilayah rural akibat ketimpangan akses. Hal ini menyoroti pentingnya *ecology of access*, di mana distribusi informasi yang timpang menciptakan fragmentasi partisipasi. Temuan lapangan menegaskan bahwa konteks lokal bukan sekadar latar, tetapi aktor aktif yang memengaruhi makna dan efektivitas pendidikan politik. Jika strategi tidak dirancang secara dialogis dengan memperhatikan relasi sosial, budaya, dan teknologi lokal, partisipasi yang inklusif sulit terwujud. Dalam kerangka Ekologi Politik Budaya (Akinyetun, 2021) perilaku

politik dipengaruhi oleh jaringan nilai, norma sosial, dan relasi kuasa, bukan hanya oleh faktor psikologis atau struktural. Ketegangan antara legitimasi modern (berbasis pilihan rasional) dan legitimasi tradisional (berbasis loyalitas sosial) memperlihatkan bahwa pendidikan politik top-down sering kali mengalami reduksi makna karena tidak relevan secara simbolik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dibangun sebagai proses dialogis dan intersubjektif antara institusi, pemuda, dan komunitas lokal, dengan pendekatan yang sensitif secara kultural, fleksibel secara format, dan sadar terhadap konteks struktural.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pendidikan politik KPU Kabupaten Gowa masih bercorak ambivalen antara sosialisasi prosedural dan pemberdayaan transformatif. Meski ada upaya memperluas literasi politik, pendekatan yang digunakan cenderung top-down dan kurang kontekstual terhadap budaya lokal. Program-program tersebut meningkatkan pengetahuan prosedural dan efikasi internal pemilih muda, namun belum berdampak signifikan pada kepercayaan institusional atau partisipasi kolektif. Hambatan struktural seperti nilai panngaderreng, ketimpangan digital, dan patronase lokal membatasi efektivitasnya. Analisis teoritik menunjukkan bahwa pendidikan politik yang tidak sensitif terhadap konteks sosial-budaya berisiko memperkuat eksklusi politik. Karena itu, efektivitas harus diukur dari kemampuannya membangun kesadaran kritis, agensi kolektif, dan ruang partisipasi yang inklusif. Studi ini merekomendasikan pendekatan *participatory codesign* dan *peerled civic education*, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih longitudinal dan kontekstual.

REFERENSI

Akinyetun, T. S. (2021). Youth Political Participation, Good Governance and Social Inclusion in Nigeria: Evidence From Nairaland. *Canadian Journal of Family and Youth / Le Journal Canadien De Famille Et De La Jeunesse*, *13*(2), 1–13. https://doi.org/10.29173/cjfy29648

Amedu, A. A. (2023). Media Educational Contents and Youths' Knowledge in Nigeria Political Activities. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *VII*(VIII), 1553–1563. https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.7920

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, *84*(2), 191–215. https://doi.org/10.1037//0033-295x.84.2.191

Basabah, M. H. H. (2024). Exploring the Pragmatism of Malaysian Youth Towards Politics. *Journal of Islamic World and Politics*, *8*(1), 1–13. https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i1.87

Boulianne, S., & Brailey, M. (2014). Attachment to Community and Civic and Political Engagement: A Case Study of Students. *Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne De Sociologie*, *51*(4), 375–388. https://doi.org/10.1111/cars.12052

BPS Gowa. (2024). *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik KabupatenGowa. https://gowakab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/6a050ae47380b913c426b79f/kabupaten-gowa-dalam-angka-2024.html

Bulqiyah, H., Kartikasari, D. W., & Taek, P. A. G. (2023). Karakter Pemilih Pemula di Kabupaten Tuban: Adaptasi Budaya Politik Sekolah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(2), 87–93. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2183

Eisman, A. B., Zimmerman, M. A., Kruger, D. J., Reischl, T. M., Miller, A. L., Franzen, S., & Morrel-Samuels, S. (2016). Psychological Empowerment Among Urban Youth: Measurement Model and Associations With Youth Outcomes. *American Journal of Community Psychology*, *58*(3–4), 410–421. https://doi.org/10.1002/ajcp.12094

Fikri, R., Amrillah, M. F., Mulianto, B., Mohammad, N. binti, & Gusnaldi, R. (2023). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Dalam Kebijakan Pendidikan: Sebuah Alternatif Untuk Mengoptimalkan Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Sekolah) Melalui Pendekatan Kolaboratif Di Kampung Mukim Singkir Kedah Malaysia*. *1*(02 (Oktober)), 25–32. https://doi.org/10.25299/berdaya.2023.14855

Hannuksela, V. (2024). Explaining the Gap: Why Do Swedish-speaking Minority Youth Have Higher Political Self-efficacy Than Finnish-speaking Majority Youth? *Scandinavian Political Studies*, *47*(1), 72–96. https://doi.org/10.1111/1467-9477.12265

Harsyaf, N. F., & Khaerah, N. (2023). *Understanding the Electoral Preferences of Beginner Voters in the 2020 Bulukumba Local Elections*. *2*(2), 82–93. https://doi.org/10.46507/jclp.v2i2.473

Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). *Canadian Journal of Program Evaluation*, *30*(1), 108–110. https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108

Kamil, I., & Indah, D. (2022). Political Communication Education for Beginner Voters in Convenient Regional Head Elections in 2024. *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, *14*(2), 855–868. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3767

Knudsen, B. T., & Stage, C. (2015). *Introduction: Affective Methodologies*. 1–22. https://doi.org/10.1057/9781137483195_1

Kosandi, M. (2015). Kontestasi Politik Dan Perimbangan Kekuasaan Dalam Perumusan Dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, *1*(1). https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8

Marsuki, N. R., Oruh, S., & Agustang, A. (2022). Youth Apathy in Political Contest: A Case Study in the 2020 Gowa Regency Head Election. *Jed (Jurnal Etika Demokrasi)*, *7*(1), 73–82. https://doi.org/10.26618/jed.v7i1.6296

Murtiningsih, I., Toni Harsan, N., Siti Fatimah, N., Ainur Febriyanti, N., & Rizka Handayani, N. (2024). Penyuluhan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024. *Ijecs Indonesian Journal of Empowerment and Community Services*, *5*(2), 132–139. https://doi.org/10.32585/ijecs.v5i2.5071

Novianti, N. (2023). *Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula Di Kecamatan Nunukan Selatan*. *2*(1), 33–40. https://doi.org/10.61457/jumpa.v2i1.21

Ohme, J. (2019). When Digital Natives Enter the Electorate: Political Social Media Use Among First-Time Voters and Its Effects on Campaign Participation. *Journal of Information Technology & Politics*, *16*(2), 119–136. https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1613279

Palomares, P. P., Cadutdut, D. E., Amod, A.-F., & Tomaro, Q. P. V. (2021). Determining the Motivations for Political Participation Among Elected Youth Leaders. *Journal of Government and Politics*, *12*(1). https://doi.org/10.18196/jgp.121127

Sanusi, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Pendidikan (Hakikat, Pendekatan, Strategi, Model, Tahapan, Dan Faktor Yang Memengaruhi)*. 16–25. https://doi.org/10.29313/idarotuna.v1i1.3823

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation. *Journal of Information Technology & Politics*, *18*(4), 443–454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

Thamrin, A., Can, L. R., & Musiana, M. (2024). Analysis of Youth Empowerment Policies in Supporting Sustainable Development in Developing Countries. *West Science Interdisciplinary Studies*, *2*(04), 859–863. https://doi.org/10.58812/wsis.v2i04.818

Utomo, A., & Sari, A. (2023). Dampak Ekonomi Pada Migrasi Siaran TV Digital Bagi Masyarakat Dalam Pembagian Set Top Box Gratis Tidak Merata Di Provinsi Banten. *Jurnal Minfo Polgan*, *12*(1), 926–933. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12546

Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000research*, *12*, 543. https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3

Yaakub, M. T., Kamil, N. L. M., & Nordin, W. N. A. W. M. (2023). Youth and Political Participation: What Factors Influence Them? *Jurnal Institutions and Economies*, *15*(2), 87–114. https://doi.org/10.22452/ijie.vol15no2.4

Zimmerman, M. A., & Rappaport, J. (1988). Citizen Participation, Perceived Control, and Psychological Empowerment. *American Journal of Community Psychology*, *16*(5), 725–750. https://doi.org/10.1007/bf00930023